



## **PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : BUDI WIBOWO, S.H., S.I.K., M.H.**

**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI LAMPUNG**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**

**Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Desember 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI  
LAMPUNG**

**MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**

**BUDI WIBOWO, S.H., S.I.K., M.H.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	3 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3,1 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	65 %
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	60 Orang
8	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah tenaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	5 Orang
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga
10	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah unit penyelenggara layanan	12 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	layanan rehabilitasi narkotika	rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	
11	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,3 Indeks
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	15 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	5 Kabupaten/Kota
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	5 Kabupaten/Kota
19	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks

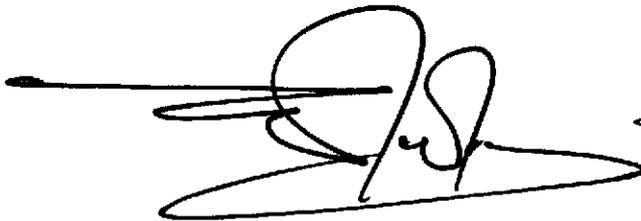
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp.509.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp.610.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Rp.1.181.382.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Rp.105.200.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Rp.240.536.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Rp.1.181.520.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba Rp.270.874.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi Rp.110.000.000

9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.700.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.199.620.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.7.154.466.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.131.218.000
13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.186.169.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.7.453.155.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.135.000.000

Jakarta, 18 Desember 2023

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**



**MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.**

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI  
LAMPUNG**



**BUDI WIBOWO, S.H., S.I.K., M.H.**